Muhammadiyah adalah suatu organisasi, merupakan alat perjuangan untuk mencapai suatu cita. Muhammadiyah didirikan di atas atau berlandaskan dan untuk mewujudkan pokok-pokok pikiran yang merupakan prinsip-prinsip bagi kehidupan dan perjuangannya. Sehingga dalam setiap langkah perjuangannya harus didasari oleh pokok-pokok pikiran tersebut.

Pokok-pokok pikiran/prinsip-prinsip yang dimaksud itu merupakan asas-asas kepribadiannya.

Di atas pokok-pokok pikiran/prinsip-prinsip yang dimaksud adalah hak dan nilai hidup Muhammadiyah secara ideologis. Pokok-pokok pikiran/prinsip-prinsip yang dimaksud itu diuraikan dalam Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah.

Lahirnya Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah

1. Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dibuat oleh almarhum Ki Bagus H. Hadikusuma (Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah tahun 1942-1953), dengan bantuan beberapa orang sahabat-sahabatnya. Dimulai menyusunnya pada tahun 1945 dan disahkan pada Sidang Tanwir tahun 1961.

2. Disusunnya Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah tersebut mempunyai latar belakang yang perlu sekali diketahui untuk dapat memahami fungsinya.

3. Latar belakang tersebut adalah mulai nampak/terasa adanya kekaburan dalam Muhammadiyah sebagai akibat proses kehidupannya sesudah lebih dari 30 tahun yang ditandai oleh:

a. Terdesaknya pertumbuhan dan perkembangan jiwa/ruh Muhammadiyah oleh perkembangan lahiriah.

b. Masuknya pengaruh dari luar yang tidak sesuai yang sudah menjadi lebih kuat.

4. Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah tersebut merupakan hasil ungkapan Ki Bagus menyoroti kembali pokok pikiran-pokok pikiran Almarhum K.H.A. Dahlan yang merupakan kesadaran beliau dalam perjuangan selama hidupnya, yang antara lain hasilnya ialah berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah.

5. Ki Bagus berharap mudah-mudahan dengan Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini dapatlah kiranya Muhammadiyah dijaga, dipelihara dan atau ditajdidkan, agar selalu dapat dengan jelas dan gamblang diketahui: Apa dan Bagaimana Muhammadiyah itu.

* Pokok Pikiran Pertama:

“Hidup manusia harus berdasarkan tauhid (meng-esa-kan) Allah: ber-Tuhan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah.”

Pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Muqadimah Anggaran Dasar sebagai berikut:

“Amma ba’du. Bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Ber-Tuhan dan beribadah serta tunduk dan taat kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk terutama manusia.”

* Pokok pikiran kedua :

“Hidup manusia itu bermasyarakat.”

Pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar sebagai berikut:

“Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas hidup manusia di dunia ini.”

* Pokok pikiran ketiga:

“Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya satu-satunya yang dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama (masyarakat) dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki , di dunia dan di akhirat.

Pokok Pikiran tersebut dirumuskan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar sebagai berikut:

“Masyarakat yang sejahtera, aman damai makmur dan bahagia hanya dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran persaudaraan dan gotong-royong bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah, yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh syaitan dan hawa nafsu.

* Pokok pikiran keempat :

“Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, adalah wajib, sebagai ibadah kepada Allah berbuat ihsan dan islah kepada manusia/masyarakat.”

Pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar sebagai berikut:

“Menjunjung tinggi hukum Allah lebih dari pada hukum yang mana pun adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang mengaku bertuhan kepada Allah.

Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Saw dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat.”

* Pokok pikiran kelima:

“Perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, hanyalah akan dapat berhasil dengan mengikuti jejak (ittiba’) perjuangan para Nabi terutama perjuangan Nabi Besar Muhammad Saw.”

Pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah sebagai berikut:

“Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa sebagaimana yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang terutama umat Islam yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, wajiblah mengikuti jejak Nabi yang suci itu, beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di dunia ini, dengan niat yang murni tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridhaNya belaka serta mempunyai rasa tanggungjawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya; lagi pula harus sabar dan tawakal bertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya, atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya, dengan penuh mengharapkan akan perlindungan dan pertolongan Allah yang Maha Kuasa.”

* Pokok Pikiran Keenam:

“Perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebagik-baiknya dan berhasil, bila dengan cara berorganisasi. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya.

Pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar sebagai berikut:

“Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka barakah dan rahmat Allah dan didorong oleh firman dalam Al Qur’an

Artinya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS/ Ali Imran : 104)

Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah atau 18 Nopember 1912 Miladiyah, oleh almarhum KHA. Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai “GERAKAN ISLAM” dengan nama “MUHAMMADIYAH” yang disusun dengan Majelis-majelis (bagian-bagiannya), mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan “syura” yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau Muktamar.”

* Pokok Pikiran Ketujuh:

(Merupakan kesimpulan)

Pokok pikiran-pokok pikiran/prinsip-prinsip/pendirian-pendirian seperti yang diuraikan dan diterangkan di muka itu, adalah yang dapat mewujudkan, keyakinan dan cita-cita hidupnya terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya, ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur lahir batin yang diridai Allah, ialah MASYARAKAT ISLAM YANG SEBENAR-BENARNYA.

Pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam Muqaddimah Anggaran dasar sebagai berikut:

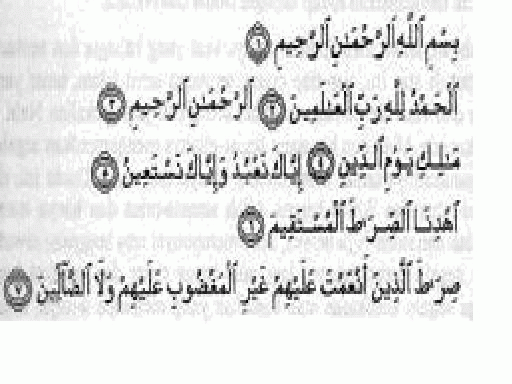
Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti Sunah Rasul-Nya Nabi muhammd Saw, guna mendapat karunia dan ridaNya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentosa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah, sehingga merupakan:

Artinya:

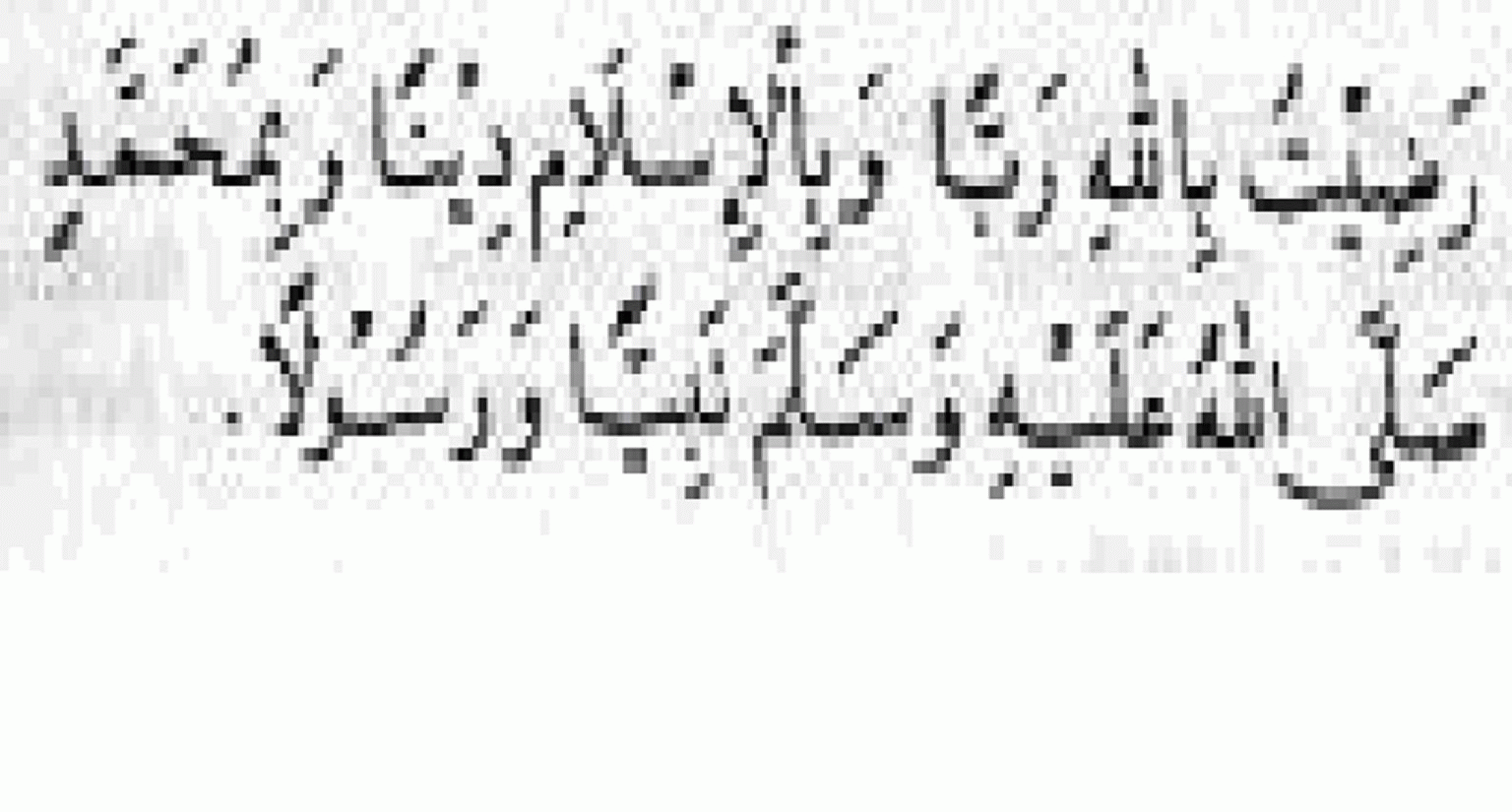
Suatu negara yang indah, bersih, suci dan makmur di bawah lindungan Tuhan yang maha Pengampun.” (QS. Saba’ : 15)

**KEPUTUSAN MUKTAMAR MUHAMMADIYAH KE-45 TENTANG  
ANGGARAN DASAR MUHAMMADIYAH**

**MUQADDIMAH**



*“Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang. Segala  
puji bagi Allah yang mengasuh semua alam, yang Maha Pemurah  
dan Maha Penyayang, Yang memegang pengadilan pada hari  
kemudian. Hanya kepada Engkau hamba menyembah, dan hanya  
kepada Engkau, kami mohon pertolongan. Berilah petunjuk kepada  
hamba akan jalan yang lempang, jalan orang-orang yang telah  
Engkau beri kenikmatan, yang tidak dimurkai dan tidak tersesat.”  
(QS Al-fatihah)*

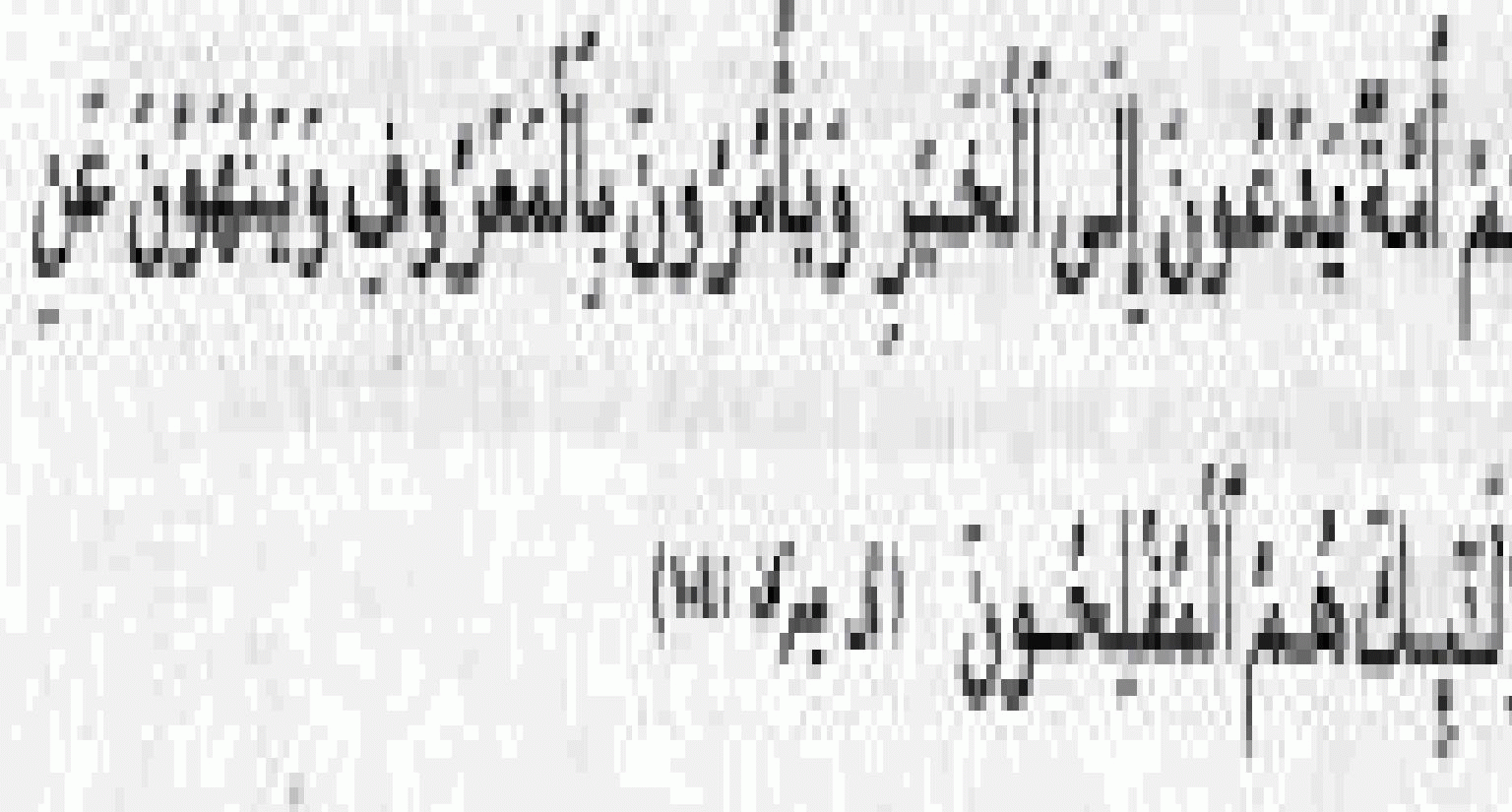
  
"Saya ridla: Ber-Tuhan kepada ALLAH, ber-Agama kepada ISLAM dan ber-Nabi kepada MUHAMMAD RASULULLAH Shalallahu 'alaihi wassalam".

AMMA BA'DU, bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah semata-mata. Ber-Tuhan dan ber'ibadah serta tunduk dan tha'at kepada Allah adalah satu-satunya ketentuan yang wajib tiap-tiap makhluk, terutama manusia. Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah(hukum qudrat iradat) Allah atas kehidupan manusia di dunia ini.

Masyarakat yang sejahtera, aman damai, makmur, dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan diatas keadilan, kejujuran, persaudaraan, dan gotong royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari pengaruh yaithan dan hawa nafsu. Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci, adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya. Menjunjung tinggi hukum Allah lebih dari hukum yang manapun juga, adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-Tuhan kepada Alaah.

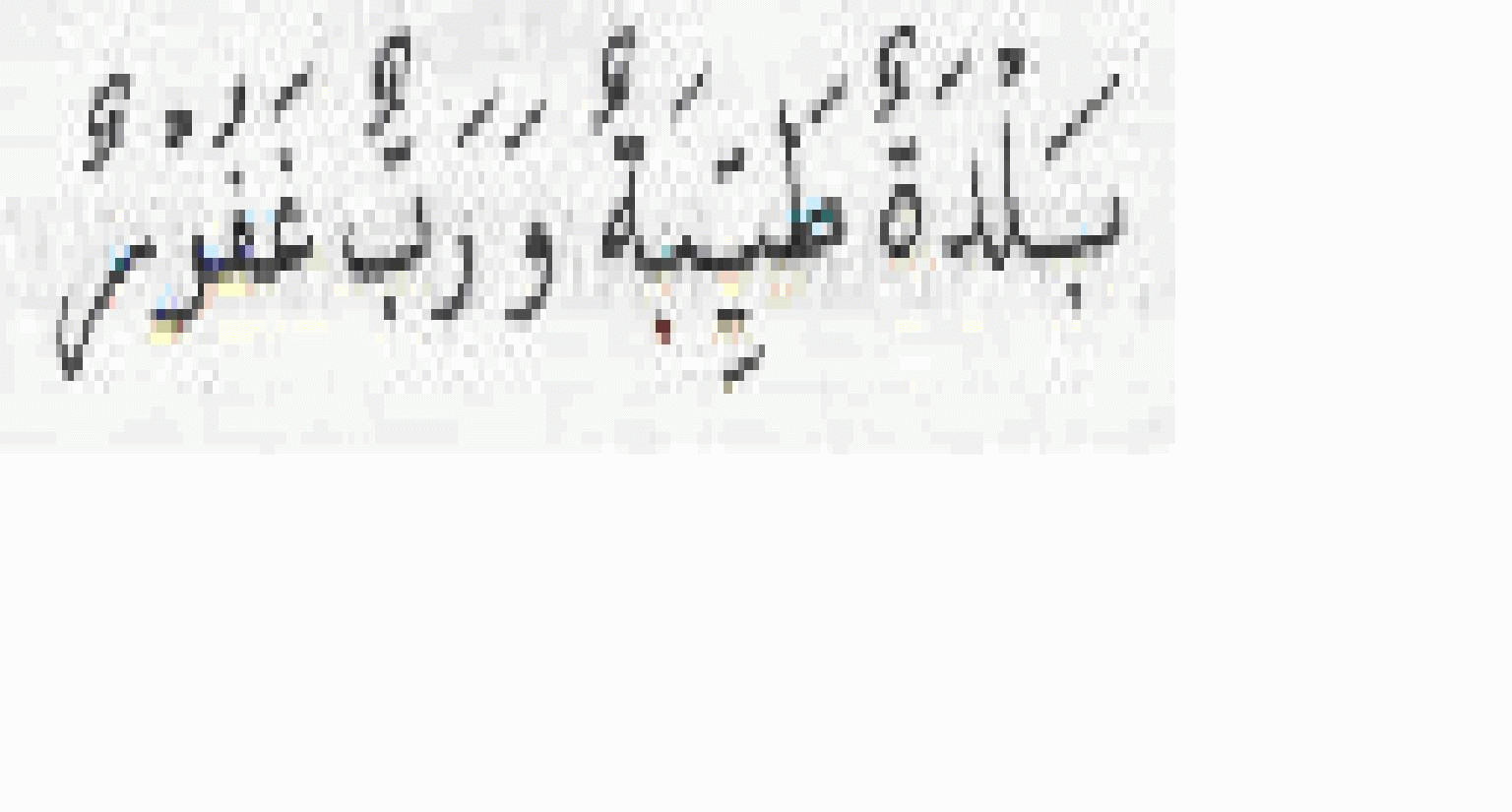
Agama Islam adalah Agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw, dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia Dunia dan Akhirat. Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentausa sebagai yang tersebut diatas itu, tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan Hari Kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci, beribadahkepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu didunia ini, dengan niat yang murni-tulus, dan ikihlas kepada Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridha-Nya belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadiratAllah atas segala perbuatannya, lagi pula harus sabar dan tawakkal bertabah hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya, atau rintangan yang menghalangi pekerjaannya, dengan penuh pengharapan, perlindungan dan pertolongan Allah Yang Maha Kuasa.

Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka dengan berkat dan rahmat Allah didorong dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:



"Adakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada ke-Islaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia" (Ali-Imran 104)

Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah atau 18 Nopember 1912 Miladiyah, oleh almarhum KHA. Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai "gerakan Islam" dengan nama "MUHAMMADIYAH" yang disusun dengan Majelis-Majelis(Bahagian-bahagian)-nya, mengikuti perkembangan zaman serta berdasarkan "syura" yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau Muktamar. Kesemuanya itu perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw., guna mendapat karunia dan ridla-Nya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai masyarakat yang sentau sa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah yang melimpah-limpah, sehingga merupakan:



"Suatu negara yang indah, bersih suci, dan makmur di bawah perlindungan Allah Yang Maha Pengampun)"

Maka dengan Muhammadiyah ini, mudah-mudahan umat Islam dapatlah diantarkan ke pintu Surga Jannatun Na'im dengan keridlaan Allah Yang Rahman dan Rahim.

Adapun Persyarikatan Muhammadiyah beranggaran dasar sebagai berikut:

**BAB I**

**NAMA, PENDIRI, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1  
Nama**

Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah

**Pasal 2  
Pendiri**

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan tanggal 18 Nopember 1912 Miladiyah di Yogyakarta untuk jangka waktu tidak terbatas.

**Pasal 3  
Tempat Kedudukan**

Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta

**BAB II  
IDENTITAS, ASAS, DAN LAMBANG**

**Pasal 4  
Identitas dan Asas**

1. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Muhammadiyah berasas Islam.

**Pasal 5  
Lambang**

Muhammadiyah adalah matahari bersinar utama dua belas, di tengah bertuliskan(Red, huruf arab) "*Muhammadiyah"* dan dilingkari kalimat(Red, huruf arab) *"Asyhadu an laa ilaaha illa Allaah wa asyhadu anna Muhammadan Rasuul Allaah"*

**BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA**

**Pasal 6  
Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegfakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

**Pasal 7  
Usaha**

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan.
2. Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan, yang macam-macam penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan adalah Pimpinan Muhammadiyah.

**BAB IV  
KEANGGOTAAN**

**Pasal 8  
Anggota serta Hak dan Kewajiban**

1. Angota Muhammadiyah terdiri atas:
2. Anggota Biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam.
3. Anggota Luar Biasa isalah orang Islam bukan warga negara Indonesia.
4. Anggota Kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah.
5. Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB V  
SUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI**

**Pasal 9  
Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Muhammadiyah terdiri atas:

1. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan
2. Cabang ialah kesatuan Ranting dalam satu tempat.
3. Daerah ialah kesatuan Cabang dalam satu Kota atu Kabupaten.
4. Wilayah ialah jkesatuan Daerah dalam satu Propinsi
5. Pusat ialah kesatuan Wilayah dalam Negara.

**Pasal 10  
Penetapan Organisasi**

1. Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
2. Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh pimpinan Wilayah.
3. Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.
4. Dalam hal-hal luar biasa pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

**BAB VI  
PIMPINAN**

**Pasal 11  
Pimpinan Pusat**

1. Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan.
2. Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya tiga belas orang, dipilh dan ditetapkan oleh Muktamar untuk satu masa jabat dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwar.
3. Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Muktamar dari dan atas usul anggota Pimpinan Pusat terpilih.
4. Anggota Pimpinan pusat terpilih menetapkan Sekretaris Umum dan diumumkan dalam forum Muktamar.
5. Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya bila dipandang perlu dengan mengusulkan kepada Tanwir.
6. Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris, mewakili Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan.

**Pasal 12  
Pimpinan Wilayah**

1. Pimpinan Wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.
2. Pimpinan Wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya sebelas orang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Wilayah.
3. Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Wilayah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Wilayah.
4. Pimpinan Wilayah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat.

**Pasal 13  
Pimpinan Daerah**

1. Pimpinan Daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.
2. Pimpinan Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya sembilan orang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah untuk satu masa jabatan dari calon-calon anggota Pimpinan Daerah yang dipilih dalam Musyawarah Daerah.
3. Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Daerah terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Daerah.
4. Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Daerah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah.

**Pasal 14  
Pimpinan Cabang**

1. Pimpinan Cabang memimpin Muhammadiyah dalam Cabangnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya..
2. Pimpinan Cabang terdiri atas sekurang-kurangnya tujuh orang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Cabang.
3. Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Cabang terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Cabang.
4. Pimpinan Cabang dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.

**Pasal 15  
Pimpinan Ranting**

1. Pimpinan Ranting memimpin Muhammadiyah dalam Rantingnya serta melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya..
2. Pimpinan Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya lima orang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang untuk satu masa jabatan dari calon-calon anggota Pimpinan Daerah yang dipilih dalam Musyawarah Ranting.
3. Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari dan atas usul calon-calon anggota Pimpinan Ranting terpilih yang telah disahkan oleh Musyawarah Ranting.
4. Pimpinan Ranting dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.

**Pasal 16  
Pemilihan Pimpinan**

1. Anggota pimpinan terdiri atas anggota Muhammadiyah.
2. Pemilihan dapat dilakukan secara langsung atau formatur.
3. Syarat anggota Pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 17  
Masa Jabatan Pimpinan**

1. Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting lima tahun.
2. Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut.
3. Serah-terima jabatan Pimpinan Pusat dilakukan saat Muktamar telah menetapkan Pimpinan Pusat baru. Sedang serah-terima jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan setelah disahkan oleh Pimpinan di atasnya.

**Pasal 18  
Ketentuan Luar Biasa**

Dalam hal-hal luar biasa yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pada pasal 12 sampai dengan 17, Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

**Pasal 19  
Penasihat**

1. Pimpinan Muhammadiyah dapat mengangkat penasihat.
2. Ketentuan tentang penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB VII  
UNSUR PEMBANTU PIMPINAN**

**Pasal 20  
Majelis dan Lembaga**

Unsur Pembantu Pimpinan terdiri atas Majelis dan Lembaga.

Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok Muhammadiyah.

Lembaga adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah.

Ketentuan tentang tugas dan pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

**BAB VIII  
ORGANISASI OTONOM**

**Pasal 21  
Pengertian dan Ketentuan**

1. Organisasi Otonom ialah wsatuan organisasi dibawah Muhammadiyah yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan pembinaan oleh Pimpinan Muhammadiyah.
2. Organisasi Otonom terdiri atas organisasi otonom umum dan organisasi otonom khusus.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom disusun oleh organisasi otonom masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
4. Pembentukan dan pembubaran Organisasi Otonom ditetapkan oleh Tanwir.
5. Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB IX  
PERMUSYAWARATAN**

**Pasal 22  
Muktamar**

1. Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan Pusat.
2. Anggota Muktamar terdiri atas:
3. Anggota Pimpinan Pusat
4. Ketua pimpinan Wilayah
5. Anggota Tanwir Wakil Wilayah
6. Ketua Pimpinan Daerah
7. WAkil Daerah yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Daerah, terdiri atas wakil Cabang berdasarkan perimbangan jumlah Cabang dalam tiap Daerah.
8. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat
9. Muktamar diadakan satu kali dalam lima tahun.
10. Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 23  
Muktamar Luar Biasa**

1. Muktamar Luar Biasa ialah muktamar darurat disebabkan oleh keadaan yang membahayakan muhammadiyah dan atau kekosongan kepemimpinan, sedang Tanwir tidak berwenang memutuskannya.
2. Muktamar Luar Biasa diadakan oleh pimpinan Pusat atas keputusan tanwir
3. Ketentuan mengenati Muktamar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 24  
Tanwir**

1. Tanwir adalah permusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah Muktamar, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
2. Anggota Tanwir terdiri atas:
3. Anggota Pimpinan Pusat
4. Ketua Pimpinan Wilayah
5. Wakil Wilayah
6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat
7. Tanwir diadakan sekurang-kurangnya tiga kali dalam masa jabatan pimpinan.
8. Acara dan ketentuan lain tentang Tanwir diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 25  
Musyawarah Wilayah**

1. Musyawarah Wilayah adalah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Wilayah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Wilayah.
2. Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas:
3. Anggota Pimpinan Wilayah
4. Ketua Pimpinan Wilayah
5. Anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah
6. Ketua Pimpinan Cabang
7. Wakil Cabang yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Cabang yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah atas dasar perimbangan jumlah Ranting dalam setiap Cabang
8. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah.
9. Musyawarah Wilayah diadakan satu kali dalam lima tahun.
10. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 26  
Musyawarah Daerah**

1. Musyawarah Daerah adalah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
2. Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:
3. Anggota Pimpinan Daerah
4. Ketua Pimpinan Cabang
5. Anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Cabang
6. Ketua Pimpinan Ranting
7. Wakil Ranting yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Ranting yang jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas dasar perimbangan jumlah anggota.
8. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah.
9. Musyawarah Daerah diadakan satu kali dalam lima tahun.
10. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 27  
Musyawarah Cabang**

1. Musyawarah Cabang adalah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Cabang, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
2. Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:
3. Anggota Pimpinan Cabang
4. Ketua Pimpinan Ranting
5. Anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Ranting
6. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang.
7. Musyawarah Cabang diadakan satu kali dalam lima tahun.
8. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 28  
Musyawarah Ranting**

1. Musyawarah Ranting adalah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Ranting, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Ranting.
2. Anggota Musyawarah Ranting terdiri atas:
3. Anggota Muhammadiyah dalam Ranting
4. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Ranting.
5. Musyawarah Ranting diadakan satu kali dalam lima tahun.
6. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 29  
Musyawarah Pimpinan**

1. Musyawarah Pimpinan ialah permusyawaran Pimpinan dalam Muhammadiyah pada tingkat Wilayah sampai dengan Rantingyang berkedudukan di bawah Musyawarah pada masing-masing tingkat.
2. Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
3. Acara dan ketentuan lain mengenai Musyawarah Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 30  
Keabsahan Musyawarah**

Keputusan Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dnegan pasal 29 kecuali pasal 23 diusahakan dengan cara mufakat. Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.

**BAB X  
RAPAT**

**Pasal 32  
Rapat Pimpinan**

1. Rapat Pimpinan ialah rapat dalam Muhammadiyah di tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Muhammadiyah apabila diperlukan.
2. Rapat Pimpinan membicarakan masalah kebijakan organisasi.
3. Acara dan ketentuan lain mengenai Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 33  
Rapat Kerja**

1. Rapat Kerja ialah rapat yang diadakan untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut amal usaha, program, dan kegiatan organisasi.
2. Rapat Kerja dibedakan dalam dua jenis, yaitu Rapat Kerja Pimpinan dan Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan.
3. Rapat Kerja Pimpinan pada tiap tingkat diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
4. Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan diadakan dua kali dalam satu masa jabatan.
5. Acara dan ketentuan lain mengenai Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 34  
Tanfidz**

1. Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat yang dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
2. Keputusan Muktamar, Tanwir, Musyuawarah, dan Rapat berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.
3. Tanfidz keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat semua tingkat:
4. Bersifat redaksional
5. Mempertimbangkan kemaslahatan
6. Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

**BAB XI  
KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

**Pasal 35  
Pengertian**

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah.

**Pasal 36  
Sumber**

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah diperoleh dari:

1. Uang pangkal, iuran, dan bantuan
2. Hasil hak miloik Muhammadiyah.
3. Zakat, infaq, shadaqah, wakaf, wasiat, dan hibah.
4. Usaha-usaha perekonomian Muhammadiyah.
5. Sumber-sumber lain

**Pasal 37  
Pengelolaan dan Pengawasan**

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XII  
LAPORAN**

**Pasal 38  
Laporan**

Pimpinan Muhammadiyah semua tingkat wajib membuat laporan perkembangan organisasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan serta kekayaan, disampaikan kepada Musyawarah pimpinan, Musyawarah tingkat masing-masing, Tanwir, dan Muktamar.

Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

**BAB XIII  
ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 39  
Anggaran Rumah Tangga**

1. Anggaran Rumah Tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar.
2. Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat berdasarkan Anggaran Dasar yang disahkan oleh Tanwir.
3. Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, Pimpinan Pusat dapat mengubah Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir.

**BAB XIV  
PEMBUBARAN**

**Pasal 40  
Pembubaran**

Pembubaran Muhammadiyah hanya dapat dilakukan dalam Muktamar Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu atas usul Tanwir.

Muktamar Luar Biasa yang membicarakan usul Tanwir tentang pembubaran dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota Muktamar Luar Biasa.

Keputusan pembubaran diambil sekurang-kurangnya tiga perempat dari yang hadir.

Muktamar luar Biasa memutuskan segala hak milik Muhammadiyah diserahkan untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam setelah Muhammadiyah dinyatakan bubar.

**BAB XV  
PERUBAHAN**

**Pasal 41  
Perubahan Anggaran Dasar**

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Muktamar.
2. Rencana Perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Tanwir dan harus sudah tercantum dalam acara Muktamar.
3. Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Muktamar yang hadir.

**BAB XVI  
PENUTUP**

**Pasal 42  
Penutup**

Anggaran Dasar ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Muktamar ke-45 yang berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Akhir 1426 H bertepatan dengan tanggal 3 s.d. 8 Juli 2005 M. di Malang, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditanfidzkan.

**MUQADIMAH ANGGARAN DASAR**

**MUHAMMADIYAH**

****

NAMA KELOMPOK :

SALSABILA ABIDAH AZIZ

TASHA RUVIANITA

VENITA ANGGRAENI

VENY NURLIANI

WILA QURROTU AINI

**PENDIDIKAN BIOLOGI**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

**JAKARTA**

**2010**